



Jumlah Penggerobak Kurang Banyak

■ Legislatif Pertanyakan Kesiapan Pemkot Terkait Mundurnya Program Jemput Sampah

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dalam mengulirkan program penanganan sampah berbasis kewilayahan. Pasalnya, sampai dengan awal Maret, operasional penggerobak atau *transporter* secara menyeluruh untuk menyebarkan sampah dari rumah tangga ke depo tak kunjung terealisasi.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho, mengatakan, program tersebut mundur dari jadwal peluncuran semula pada 1 Maret 2025. Ia pun berharap, Wali Kota Yogya segera bersikap dengan membuat edaran terkait mundurnya jadwal dan kapan akan direalisasikan, agar masyarakat ada kepastian.

"Pemkot Yogya harus konsisten terhadap program yang sudah dicarikan sejak awal. Apalagi, mengenai penanganan sampah, perihal operasional penggerobak, yang sudah disosialisasikan secara massif di wilayah," katanya, Senin (3/3).

Pada Sabtu (1/3) lalu, Nurcahyo pun mengaku mendapati langsung depo di Lapangan Karang masih dipenuhi oleh masyarakat yang mendistribusikan sampahnya secara mandiri. Artinya, depo masih menerima limbah dari warga, bukan penggerobak, selaras inti dari penanganan sampah berbasis kewilayahan.

"Padahal, perangkat wilayah memberi sambutan antusias. Seperti Ketua RT 45 RW 8 Pandeyan, Pak Wahyu Sutopo, yang langsung menunjuk penggerobak, menyilangkan armada roda tiga dan sebagainya. Warga sudah semangat, tetapi saat waktu yang ditentukan sudah tiba, ternyata penggerobak belum bisa buang sampah ke situ. Lantas, pendataan penge-

BELUM TEREALISASI

- Kalangan legislatif mempertanyakan kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogya dalam mengulirkan program penanganan sampah berbasis kewilayahan.
- Pasalnya, sampai dengan awal Maret, operasional penggerobak atau *transporter* secara menyeluruh untuk menyebarkan sampah dari rumah tangga ke depo tak kunjung terealisasi.
- DLH Kota Yogya menyebut penundaan jadwal penjemputan sampah lantaran belum siapnya personel penggerobak

robak yang sudah dilakukan sebelumnya, apa gunanya?," urai Nurcahyo.

Meski demikian, ia tidak menampik, terdapat pula beberapa wilayah yang belum siap dan masih membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Sehingga, Anggota Komisi D itu menyebut, konsistensi menjadi unsur penting, supaya apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama tetap dijalankan.

"Ketika dalam perjalanan, masih ada hal yang kurang atau perlu perbaikan, itu jadi bagian dari evaluasi bersama. Dengan begitu, pemerintah mendapatkan kepercayaan dari publik, serta masalah sampah secepatnya teratasi," pungkasnya.

Masih pendataan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogya menyebut penundaan jadwal penjemputan sampah lantaran belum siapnya personel penggerobak yang ditugaskan jemput bola mengambil sampah dari rumah tangga menuju depo. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan DLH Kota Yogya, Ahmad Haryoko, menandaskan, pihaknya masih melakukan proses pendataan penggerobak. Jumlah 632 penggerobak yang terdaftar sejauh ini dianggap kurang, sehingga Pemkot Yogya membuka kemungkinan untuk menambahnya lagi.

"Kita masih melakukan pendataan untuk semua

penggerobak di masing-masing wilayah. Jadi, belum sampai ke *action* (penjemputan)," katanya.

Namun, Haryoko memastikan, beberapa kemandirian yang didapat jadi *project* penanganan sampah berbasis kewilayahan sudah berjalan. Salah satunya, di Kemandirian Pakualaman, atau tepatnya di Kelurahan Gunungketur dan Purwokidnanti, yang sudah menerapkannya sejak Februari lalu.

"Jadi, di sana sudah ada pemilahan, sampah dipilah antara organik dan anorganik, kemudian penggerobak kalau memang tidak terpilah tidak akan diambil. Sudah hampir sebulan itu. Yang di Pakualaman itu ada kerja sama dengan swasta. Tapi, untuk kemandirian yang lain, sampahnya dibawa menuju depo. Sudah kita siapkan armadanya juga," cetusnya.

Lebih lanjut, ia memastikan, program penanganan sampah berbasis kewilayahan tidak memandang kartu tanda penduduk (KTP) masyarakat. Dalam artian, selama yang bersangkutan berdomisili di kemandirian tertentu, serita terdapat oleh pemangku wilayah, sampahnya akan tetap diangkut asal kondisinya sudah terpilah.

"Basisnya domisili, karena di Kota Yogya kan banyak warga pendatang, misalnya anak kos, keluaran melahai Pak RT dan Pak RW sudah paham itu," pungkasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005